

BAB

4

PERKEMBANGAN KERJA SAMA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat secara merata dan prospek perbaikan yang dibayangi ketidakpastian menjadi fokus pembahasan pada fora kerja sama internasional. IMF menyuarakan urgensi memperkuat fundamental ekonomi, serta meningkatkan resiliensi dan inklusivitas. Penyelarasan kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial menjadi kunci utama. Forum kerja sama internasional juga melanjutkan upaya untuk mewujudkan Strong, Sustainable, Balanced, and Inclusive Growth (SSBIG). Langkah yang ditempuh adalah berupaya mengatasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi excessive imbalances.

Forum kerja sama juga menaruh perhatian pada perkembangan ekonomi digital, khususnya stablecoins. Fora IMF dan G20 memandang otoritas perlu memahami stablecoins dan memitigasi risikonya, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, kerahasiaan data, perlindungan konsumen, serta dampak terhadap efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Indonesia menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam memitigasi risiko tersebut. Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan asesmen terhadap regulatory and supervisory framework serta gap yang terjadi, serta mengidentifikasi kemungkinan penguatan kerja sama internasional untuk mencegah regulatory arbitrage.

Kondisi perekonomian global ke depan yang masih diwarnai ketidakpastian menuntut Bank Indonesia (BI) untuk terus memperkuat kerja sama keuangan guna mendukung stabilitas nilai tukar. Pembahasan fora kerja sama regional berfokus pada penguatan Jaring Pengaman Keuangan Internasional melalui Chiang Mai Initiatives Multilateralisation (CMIM). Selain itu, BI melakukan inovasi kebijakan dalam bentuk kerja sama keuangan dengan otoritas negara

lain untuk keperluan manajemen likuiditas dalam mengelola cadangan devisa. Dalam kaitan ini, BI menjalin kerja sama Local Currency Bilateral Swap Agreement, serta memperkuat dan memperluas kerja sama Local Currency Settlement berbasis Appointed Cross Currency Dealer.

4.1. Urgensi Memperkuat Fundamental Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat secara merata dan prospek perbaikan yang dibayangi ketidakpastian menjadi fokus pembahasan pada fora kerja sama internasional. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh meningkatnya risiko perekonomian global, antara lain eskalasi *trade tension*, ketidakpastian kebijakan, peningkatan ketegangan geopolitik, dan kerentanan di sektor keuangan. IMF kembali menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi global untuk 2019 menjadi hanya 3,0%, terendah sejak krisis keuangan global 2008.

IMF menyuarkan urgensi memperkuat fundamental ekonomi, meningkatkan resiliensi, dan inklusivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global. Penyelarasan kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial menjadi salah satu kunci utama. Pada saat tingkat inflasi cukup rendah, IMF merekomendasikan agar kebijakan moneter dapat diarahkan menjadi lebih akomodatif guna mendukung aktivitas ekonomi. Dari sisi kebijakan fiskal, dapat dilakukan konsolidasi melalui subsidi yang lebih *well-targeted* dan *revenue mobilization* untuk menciptakan ruang fiskal. Ruang fiskal tersebut dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan belanja sosial, dan mengakselerasi investasi untuk mendorong *output* potensial dan resiliensi.

IMF menekankan penggunaan kebijakan makroprudensial dan reformasi struktural. Kebijakan makroprudensial diarahkan pada penguatan pengawasan dan kebijakan makroprudensial yang lebih ketat. Kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di luar sektor perbankan. Sementara kebijakan reformasi struktural dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing negara, untuk memastikan tercapainya pertumbuhan yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko ke depan, IMF memandang diperlukannya kebijakan multilateral. Kebijakan tersebut antara lain dengan memperkuat kerja sama dan koordinasi internasional untuk kembali menyuarkan dan mendorong peran penting perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi global.

Fora BIS dan APEC juga menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang kehilangan momentum pada triwulan III 2019. Fora BIS mengamati pelemahan di sektor manufaktur akibat kelanjutan dari *trade tensions*, yang dinilai mulai merambah ke sektor jasa. Selain itu, BIS juga mencermati

tingkat inflasi di sebagian besar negara yang berada di bawah target. Guna mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, fora APEC *Senior Finance Official Meeting* (SFOM) menyampaikan beberapa *key policy recommendation*, antara lain: (i) *economy-tailored structural and fiscal reforms*, yang ditujukan untuk mendorong produktivitas dan ketahanan ekonomi; (ii) penyelesaian dan implementasi agenda reformasi ketentuan keuangan; (iii) kerja sama global terkait isu *cybersecurity* dan penanganan masuknya *big tech* ke *fintech*; dan (iv) kerja sama di area permasalahan global lainnya seperti *global imbalances*, *international taxation*, iklim, pengungsi dan penanganan korupsi.

Berbeda dengan kondisi global, perkembangan ekonomi negara ASEAN+3 masih tetap terjaga. Pada pertemuan *Senior Level Committee on ASEAN Financial Integration* (SLC) ke-18, AMRO menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan tetap terjaga, walaupun terdapat *downside risk* akibat konflik perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok. Konflik perdagangan tersebut menyebabkan pelemahan sentimen bisnis dan perlambatan pertumbuhan ekspor.

Negara ASEAN+3 perlu memercati risiko dari faktor ekonomi dan geopolitik. ASEAN+3 perlu mewaspadaikan risiko *no-deal Brexit*, ketidakpastian kebijakan moneter global, *capital outflows*, *climate change*, *cyber-attack* dan *aging population* (untuk Singapura dan Thailand). AMRO memberikan *insight* bahwa Tiongkok saat ini

mulai membatasi pembiayaan infrastruktur dan melakukan *tax cut* untuk mendorong pertumbuhan, sehingga dampak dari kebijakan tersebut akan berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Sementara itu, *policy space* yang dimiliki Tiongkok tidak sebesar sebelumnya karena tingkat utang yang sudah cukup besar.

4.2. Kerja Sama untuk Mencapai Pertumbuhan yang Kuat, Berkelanjutan, Berimbang, dan Inklusif

Forum G20 di bawah Presidensi Jepang selama 2019 melanjutkan upaya mewujudkan *Strong, Sustainable, Balanced, and Inclusive Growth* (SSBIG). G20 mendiskusikan berbagai isu seperti faktor risiko yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan upaya mengatasi *excessive imbalances*. Forum tersebut juga membahas perkembangan isu ekonomi digital, khususnya *stablecoins*.¹

IMF memberikan perhatian khusus pada berbagai faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara G20. IMF mengidentifikasi berbagai penyebab pelemahan momentum pertumbuhan, antara lain terus meningkatnya *trade tension* (risiko utama), restriksi pada *flow of technology* yang dapat berimplikasi pada

¹ IMF telah menyusun laporan "*G20 Report on Strong Sustainable Balanced and Inclusive Growth*" yang secara umum melaporkan perkembangan capaian tujuan G20.

penurunan produktivitas, pemulihan *stressed economies* yang lebih lama dari prediksi, tensi geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, ketidakpastian *Brexit*, dan kondisi keuangan yang ketat akibat pemburuan sentimen global.

IMF memandang prospek perekonomian negara G20 ke depan dibayangi sejumlah risiko. Faktor risiko tersebut antara lain pertumbuhan produktivitas yang rendah dan perubahan kondisi demografi, yang akan menahan pencapaian aspek keberlanjutan (*sustainable*). Pertumbuhan per-kapita negara G20 telah melambat dalam beberapa dekade terakhir, terutama didorong oleh penurunan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan *labor-supply* karena *aging*. Kondisi tersebut menggarisbawahi pentingnya respons kebijakan untuk mendorong produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan. Respons kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong konvergensi pendapatan negara berkembang ke tingkat pendapatan negara maju.

IMF mengemukakan bahwa *global imbalances* telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Surplus dan defisit *current account* secara umum telah menyempit sejak krisis keuangan global, meski laju penurunannya kini melambat. *Imbalances* perlu diatasi dengan melakukan reformasi struktural.² Negara-negara G20 diharapkan dapat melanjutkan reformasi struktural dan

memastikan fleksibilitas nilai tukar sebagai mekanisme *automatic adjustment*. Dalam konteks *automatic adjustment*, Indonesia mengingatkan bahwa proses penyesuaiannya akan beragam sesuai kondisi setiap negara.

IMF menggarisbawahi pentingnya menjaga sustainability utang. IMF menggarisbawahi urgensi menjaga *debt sustainability*—termasuk mengupayakan pembiayaan infrastruktur yang aman—untuk menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, IMF memandang bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara *current account surplus* dan *net corporate saving* juga sangat penting dalam merumuskan respons kebijakan yang tepat.

IMF menekankan bahwa *imbalances* dapat bermanfaat dalam kondisi tertentu. Sebagai ilustrasi, *current account surplus* diperlukan ketika surplus merefleksikan akumulasi *saving* pada *aging economies*. Sementara *current account deficit* dapat bermanfaat bagi *young and rapidly growing economies* ketika defisit terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi guna memperkuat pertumbuhan. Hal tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang memandang bahwa *current account deficit* di negara berkembang terjadi karena kebutuhan pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur, yang dalam jangka panjang akan berdampak positif terhadap ekonomi.

² Indonesia mendukung upaya reformasi struktural.

Terkait ketimpangan (aspek inclusive), IMF memandang bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan global. Berdasarkan indeks koefisien Gini, ketimpangan pendapatan di beberapa negara, seperti Kanada dan Inggris, hanya sedikit menurun dibandingkan kondisi sebelum krisis. Sementara di Amerika Serikat dan banyak negara berkembang—seperti Brazil, Tiongkok, India, Indonesia, dan Afrika Selatan—ketimpangan pendapatan telah menurun signifikan. Ketimpangan pendapatan lintas generasi di sejumlah negara G20 yang tertahan di level tinggi menunjukkan ketidakmerataan akses terhadap *opportunities*, termasuk akses pada kebutuhan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan akses keuangan, yang membatasi prospek pasar tenaga kerja.

IMF menekankan urgensi penggunaan seluruh opsi kebijakan secara terkoordinasi (joint-efforts). Penerapan kebijakan tersebut dilakukan untuk mewujudkan *Strong, Sustainable, Balanced, and Inclusive Growth* (SSBIG) di tengah berbagai tantangan ketidakpastian global. Kebijakan moneter dan fiskal diperlukan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan dan mengurangi *imbalances*, namun dapat saling melengkapi dalam kondisi yang tepat. Lebih lanjut, kebijakan makroprudensial diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan struktural diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan dan meningkatkan investasi ke depan, termasuk reformasi pendidikan yang secara simultan

dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketimpangan. Selain itu, juga penting diterapkan kebijakan untuk mengurangi tingkat utang dan memitigasi risiko dari *imbalances*.

4.3. Kerja Sama Merespons Perubahan Struktural Pada Sektor Keuangan

Bank Indonesia berperan aktif dalam mendukung pencapaian integrasi sektor keuangan ASEAN 2025 melalui Senior Level Committee on ASEAN Financial Integration. *Senior Level Committee* (SLC) dibentuk dengan mandat untuk memberikan arahan dalam mencapai integrasi keuangan kawasan. Untuk mencapai tujuan integrasi keuangan tersebut, disusun *roadmap* yang kemudian dikenal dengan *ASEAN Financial Integration Post-2015* atau *Vision 2025*. Dokumen *Vision 2025* dimaksudkan untuk menjadi "*living document*" yang dapat dimodifikasi berdasarkan kondisi, agar selalu relevan dengan tahapan integrasi keuangan terkini.

Perkembangan kemajuan dokumen Vision 2025 kembali dibahas pada Senior Level Committee on ASEAN Financial Integration ke-18.³ Pada kesempatan tersebut masing-masing *ASEAN Working Committee* melaporkan hasil pekerjaan dan mengapresiasi beberapa kemajuan yang telah dicapai, antara lain implementasi SAP, pemantauan risiko,

³ Pertemuan dilaksanakan pada 25 Oktober 2019, di Siem Reap, Kamboja.

learning roadmap, dan pengembangan *tools* (*scoremap*, *heatmap*, dll) untuk memantau kemajuan integrasi keuangan ASEAN. ASEAN *Working Committee* menyampaikan bahwa hingga Oktober 2019 telah terselesaikan 13 dari total 20 prioritas pada tahun 2019, sementara sisanya diperkirakan akan terselesaikan pada akhir tahun 2019. Beberapa prioritas yang disetujui antara lain *General Guidance on Local Currency Settlement Framework* (pada *Working Committee Capital Account Liberalization*) dan *Real Time Retail Payment System* (pada *Working Committee Payment and Settlement System*).

4.4. Kerja Sama Memperkuat Resiliensi Keuangan

4.4.1. Kerja Sama Dalam Lingkup ASEAN+3

Fora kerja sama regional ASEAN+3 berupaya melakukan penguatan Jaringan Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) melalui *Chiang Mai Initiatives Multilateralisation (CMIM)*. Kerja sama keuangan tersebut selain bertujuan untuk mendorong pertumbuhan regional dan integrasi ekonomi, juga untuk meningkatkan stabilitas ketahanan ekonomi dan keuangan regional. Fora ASEAN+3 membahas operasionalitas dari CMIM *agreement* yang telah disepakati pada pertemuan ASEAN+3 *Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3)* sebelumnya.

ASEAN+3 menyusun *strategic direction finance process* dan melakukan *test run CMIM*. ASEAN+3 telah menyusun *Strategic Direction (SD) ASEAN+3 Finance Process* (atau disebut juga *Vision Document*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi arah dan prioritas masa depan untuk jangka waktu 10 tahun menuju ASEAN+3 yang lebih tangguh, inklusif, dan terintegrasi.⁴ Selain itu, ASEAN +3 juga melakukan penguatan melalui pelaksanaan *test run* untuk menguji keandalan skema CMIM. Pelaksanaan *test run*—merupakan *test-run* ke-10— bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kesiapan operasional dari fasilitas CMIM dan AMRO sebagai *supporting agency*.

4.4.2. Kerja Sama Keuangan Local Currency Bilateral Swap Agreement

BI terus memperkuat kerjasama Jaringan Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) sebagai *second line of defense* bagi perekonomian. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar, terutama di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sebagai upaya memperluas JPKI yang *readily available*, untuk pertama kalinya di kawasan, BI bekerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) melakukan inovasi kebijakan dalam bentuk *Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA)*. Kerjasama keuangan tersebut ditujukan untuk manajemen likuiditas

⁴ Dibahas pada pertemuan ASEAN+3 *Task Force* September 2019 di Dali (Tiongkok), dan November 2019 di Tokyo, Jepang.

dalam rangka pengelolaan cadangan devisa. Kerja sama LCBSA antara BI-BNM dan BI-MAS merupakan fasilitas JPKI bilateral yang dapat diaktivasi dalam kondisi normal guna mendukung pengelolaan cadangan devisa dan pendalaman pasar keuangan.

LCBSA BI-BNM memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara BI dan BNM dengan nilai maksimum ekuivalen USD 2 miliar.⁵ Langkah ini merupakan upaya BI dalam memperkuat *market confidence* melalui penyediaan fasilitas *swap* dalam mata uang lokal untuk kebutuhan *liquidity management* dalam pengelolaan cadangan devisa. Selain itu, LCBSA BI-BNM juga ditujukan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan di regional. Lebih lanjut, fasilitas kerja sama tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu *tools* untuk mendorong beberapa aspek, yaitu: (i) investasi pada aset keuangan untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan; (ii) penyediaan mata uang lokal untuk mendukung implementasi *local currency settlement* dalam kondisi *unclear market* (sebagai *backstop facility*); dan (iii) untuk tujuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut telah disepakati pada 27 September 2019 dan berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun.

Indonesia dan Singapura melanjutkan kerja sama keuangan. BI dan MAS menyepakati perpanjangan kerja sama LCBSA BI-MAS pada 5 November

2019, berlaku selama 1 (satu) tahun.⁶ Kerja sama LCBSA BI-MAS tersebut merupakan kerja sama keuangan bilateral dalam bentuk *collateralized loan swap* dengan total nilai ekuivalen USD7 miliar.⁷ Kerja sama ini merupakan realisasi dari komitmen kedua Kepala Negara untuk memperkuat kerja sama keuangan antara Indonesia dan Singapura dalam rangka mendukung stabilitas moneter, pendalaman pasar keuangan, serta memperkuat cadangan devisa. Kerja sama tersebut semula disepakati di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali oleh kedua pemimpin negara dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman oleh BI dan MAS pada 5 November 2018.

4.4.3. Kerja Sama Keuangan Local Currency Settlement Berbasis Appointed Cross Currency Dealers

BI bersama BNM dan BOT telah menginisiasi kesepakatan kerja sama Local Currency Settlement Berbasis Appointed Cross Currency Dealers (LCS ACCD) yang bertujuan untuk mendukung kestabilan nilai tukar rupiah, baht dan ringgit. Kerja sama ini pertama kali diimplementasikan pada 2 Januari 2018. Pada tahap awal, cakupan transaksi LCS ACCD dibatasi untuk memfasilitasi transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal untuk mengurangi ketergantungan pada USD.

⁶ Kesepakatan untuk memperpanjang dilakukan pada saat penyelenggaraan *Leaders Retreat* RI-Singapura 2019 di Singapura.

⁷ SGD9,5 miliar atau IDR100 triliun.

⁵ Setara RM8 miliar atau IDR28 triliun.

Transaksi LCS ACCD mengalami perkembangan positif.

Sejak diimplementasikan pada awal 2018, transaksi LCS berbasis ACCD dalam MYR/IDR dan THB/IDR menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut tercermin dari tren peningkatan volume transaksi, frekuensi transaksi, dan jumlah nasabah pengguna. Namun, jika dibandingkan dengan total nilai perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Thailand, *share* volume transaksi LCS berbasis ACCD masih relatif kecil. Untuk meningkatkan transaksi LCS ACCD di Indonesia dan negara mitra, BI BNM dan BOT terus memperkuat framework LCS ACCD. Penguatan meliputi cakupan transaksi framework LCS dari semula hanya untuk transaksi perdagangan barang dan jasa, menjadi termasuk investasi langsung dan *income transfer*, serta beberapa relaksasi terhadap aturan yang terkait dengan *foreign exchange* guna mendukung implementasi LCS ACCD.

Inisiatif kerja sama keuangan LCS berbasis ACCD akan terus diperluas, terutama dengan negara yang memiliki keterkaitan ekonomi dan keuangan yang erat dengan Indonesia.

Setelah menyepakati untuk mendorong kerja sama LCS dengan Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) pada 5 April 2019 di Chiang Rai, Thailand, BI memperluas kerja sama LCS dengan Jepang. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara BI dan Kementerian Keuangan Jepang pada 5 Desember 2019 di Tokyo, Jepang. Kesepakatan kerja sama ini diharapkan dapat mendorong penggunaan mata uang lokal lebih luas lagi di kawasan dan mendorong perkembangan lebih lanjut pasar valuta asing dan pasar keuangan di kawasan. Selain itu, kerja sama LCS tersebut juga dapat memberikan sinyal positif mengenai komitmen BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi di kawasan, salah satunya melalui perluasan penggunaan skema LCS dengan mitra dagang utama.